

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Penghasilan atas Jasa Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang dilakukan menggunakan sistem *self assessment*. Dalam pelaksanaanya, sistem ini megajarkan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk patuh dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Membuat Pencatatan
 - b) Melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan metode perhitungan Neto
 - c) Melaksanakan pelunasan dan pelaporan pajak penghasilan
2. Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembayaran pajak merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ./2012 Pasal bahwa Notaris dan/ataun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat berperan sebagai Pemotong Pajak dan Penerima Pajak . Akan tetapi, untuk wilayah kota Padang, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) belum dapat melaksanakan kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dikarenakan gaji rata-rata seorang karyawan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih berada dibawah standar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp 4.500.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/2016

3. Kendala yang ditemui pihak pajak terkait pembayaran pajak penghasilan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara lain:
- a. Ketidakjelasan suatu aturan pelaksana dalam hal perhitungan tarif seorang Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di bidang jasa hukum terhadap suatu transaksi membuat pihak pajak mengalami kerancuan dalam membaca laporan perhitungan pajak penghasilan seorang Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nilai tarif seorang Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di lapangan tidak ada yang mencapai 1 % sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - b. Di lain hal, pihak pajak juga menyadari kurang patuhnya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan, kurang terbukanya terhadap laporan catatan/ administrasi dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kurang sosialisanya mengenai aspek perpajakan yang belum dipahami salah satunya jenis pajak yang bersifat tidak final.

B. SARAN

1. Sebaiknya ada aturan pelaksana tersendiri terkait perhitungan honorarium seorang Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan cara perhitungan honorarium seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai penjabaran dari Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak disamakan dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terkait ketentuan yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.

2. Sebaiknya Peran Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperjelas lagi dalam terkait ketentuan perpajakan khususnya pajak penghasilan . Karena sejauh ini, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk hak dan kewajibannya masih disamakan dengan wajib pajak orang pribadi lainnya.
3. a. Sebaiknya pemerintah dapat membentuk suatu peraturan pelaksana yang berkaitan dengan tarif atas jasa hukum seorang Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pembuatan akta dengan mempergunakan tabel tarif akta yang dihitung dari harga akhir transaksi.
- b. Sebaiknya pihak pajak mensosialisasikan mengenai aspek perpajakan apapun itu termasuk salah satunya jenis pajak yang bersifat tidak final.

